



DIFUSI PROFIL PEMERINTAHAN MELALUI PENGEMBANGAN WEBSITE DI KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN CIPUTAT, TANGERANG SELATAN

Siti Aisyah¹, Lilik Aslichati², Majidah³, Purwaningdyah⁴, Cherly Kemala Ulfa⁵
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
Email: aisyah@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this community service program is to encourage the disclosure of government information through diffusion of potential, public services provided, and government activities at the level of village government to the wider community. The problem in this development is the lack of understanding of the apparatus at the village government level to communicate the potential, existing public services, and other government activities to the wider community. The method of community service activities is assistance based on village government needs. The action taken is to develop a website that contains a profile of the village administration. The location of community service activities is in the Village Government, Ciputat District, South Tangerang City. Apparatus participating in the community service program are the Lurah, the Lurah Secretary, the Head of the Government Section, and several IT staff. The conclusions of the development of this program are: 1). A profile of government website has the benefit of communicating the local potential of a government and its contents can be adjusted to the needs of the community. 2). Not all village government officials realize the importance of the diffusion of potential, public services, and government activities to the wider community. 3). Not all information, data, variety of public services, and government activities can be informed on the website due to limitations in the authority of the village administration. The implication of this community service activity is the need to develop a government website at the same level and a higher level of government to encourage disclosure of government information

Keywords: *diffusion, profile, government, kelurahan*

ABSTRAK

Tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah mendorong keterbukaan informasi pemerintahan melalui difusi potensi, pelayanan publik yang disediakan dan kegiatan pemerintahan pada level pemerintahan kelurahan kepada masyarakat luas. Permasalahan dalam pengembangan ini adalah masih kurangnya pemahaman aparatur pada level pemerintahan kelurahan untuk mengomunikasikan potensi, pelayanan, dan kegiatan pemerintahan lainnya kepada masyarakat luas. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pendampingan berbasis kebutuhan pemerintah kelurahan. Tindakan yang dilakukan adalah mengembangkan website yang berisi profil pemerintah kelurahan. Lokasi kegiatan di Pemerintah Kelurahan, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Aparatur yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, dan beberapa staf IT. Kesimpulan dari pengembangan program ini adalah 1). Website profil suatu pemerintahan mempunyai manfaat dalam mengkomunikasikan potensi wilayah suatu pemerintahan dan isinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 2). Belum semua aparatur pemerintah kelurahan menyadari pentingnya difusi potensi, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat luas. 3). Tidak semua informasi, data, ragam pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan dapat diinformasikan dalam website karena faktor keterbatasan dalam kewenangan pemerintahan kelurahan. Implikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perlunya mengembangkan website pemerintahan pada level yang sama dan level pemerintahan yang lebih tinggi untuk mendorong keterbukaan informasi pemerintahan.

Kata Kunci: *difusi, inovasi, profil, pemerintah, kelurahan*

PENDAHULUAN

Difusi merupakan konsep yang menitikberatkan pada penyebaran pesan-pesan dari pihak pemberi pesan kepada penerima pesan. Hal ini seperti dikatakan oleh Rogers (1971:5-6), yang menyatakan studi difusi mengkaji pesan-pesan yang disampaikan menyangkut hal-hal baru maka di pihak penerima akan timbul suatu derajat resiko tertentu yang menyebabkan perilaku berbeda pada penerima pesan. Karena Difusi umumnya berhubungan dengan hal-hal baru yang berhubungan dengan inovasi. Inovasi merupakan gagasan baru yang dicetuskan dan diterapkan seseorang atau kelompok tertentu pada suatu komunitas pada jangka waktu tertentu. Roger Everett M. Rogers (1983) mengembangkan teori difusi inovasi, yang menyatakan berlangsungnya proses difusi inovasi tergantung pada 4 (empat) elemen pokok, yaitu: suatu inovasi, dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial.

Pada level pemerintahan daerah di Indonesia, inovasi daerah diwadhahi dalam Pasal 386 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip inovasi daerah adalah adanya peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, dalam Pasal 391 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mensyaratkan informasi pemerintahan daerah, yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Informasi pembangunan daerah mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di dalamnya termasuk kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berfungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, pemerintahan kelurahan merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan yang paling dekat dengan masyarakat.

Salah satu kelurahan yang mempunyai potensi untuk mengembangkan inovasi dalam penyampaian informasi pemerintahan adalah Kelurahan Cipayung. Kelurahan Cipayung merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ciputat, yang lokasinya berada di pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Kelurahan Cipayung mempunyai tekad menjadi kelurahan percontohan dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya namun masih mengalami kendala karena adanya permasalahan antara lain belum adanya data yang pasti tentang jumlah penduduk yang ditinggal di wilayah tersebut, belum dilakukannya pengembangan profil potensi kelurahan, serta belum tersedianya prasarana yang belum memadai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pada inovasi daerah dan kewajiban menyediakan informasi pemerintahan daerah, maka pengembangan website profil kelurahan di Cipayung menjadi

sangat relevan untuk dilaksanakan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana melaksanakan penyebaran informasi pemerintahan melalui penerapan difusi profil pemerintahan kelurahan di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode pendampingan berbasis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan merupakan unsur yang penting dalam pengabdian kepada masyarakat karena menyangkut keberterimaan program tersebut bagi client. Pembuatan website profil kelurahan dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pengisian data, *launching* program, dan evaluasi program. *Keyperson* yang mempunyai peranan penting dalam program ini adalah Lurah dan Sekretaris Lurah. Program ini dilaksanakan tahun 2019. Berikut ada alur pengembangan website profil kelurahan di Kelurahan Cipayung.



Gambar 1. Metode Pengembangan Website Profil Kelurahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan difusi profil kelurahan melalui inovasi pengembangan website tergantung pada 4 (empat) aspek, yaitu inovasi, dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem social. Hasil dari difusi profil keluraha adalah sebagai berikut:

Bentuk Inovasi. Inovasi dalam bentuk pengembangan website profil kelurahan. Alamat website adalah: <https://kelurahancipayung-tangsel.id>. Domain tersebut masih belum dapat menggunakan alamat berbasis “government”, karena pada tahap ini baru tahap pengembangan. Untuk dapat menggunakan domain berbasis pemerintahan (government/go.id) dibutuhkan perizinan lebih lanjut ke Dinas Komunikasi dan Informasi di Kota Tangerang Selatan. Tujuan pengembangan inovasi tersebut adalah menginformasikan kepada publik tentang profil kelurahan, yang meliputi gambaran geografi wilayah kelurahan, struktur organisasi, kependudukan, potensi yang ada di wilayah kelurahan, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pemerintahan.



Gambar 2. Tampilan Website

Saluran komunikasi. Komunikasi awal dibangun dengan *keyperson*, yaitu Lurah, yang selain berperan sebagai pengambil keputusan juga bertindak sebagai inovator di kelurahan. Pada komunikasi awal dibutuhkan kepercayaan dari pihak penerima program dan kesepakatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. *Keyperson* lain yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan program tersebut adalah Sekretaris Lurah, yang selain berperan dalam penyediaan data yang dibutuhkan juga motivator bagi pegawai Kelurahan dalam kegiatan ini.

Jangka waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan program ini adalah 1 (satu) tahun, yang dibagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu tahap identifikasi kebutuhan, tahap kesepakatan pelaksanaan program, pelaksanaan program yang terdiri persiapan data, gambar, foto, dan informasi lain yang ingin ditampilkan dalam website.

Sistem sosial. Aspek ini merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Anggota sistem sosial dapat individu, kelompok informal, organisasi dan sub sistem yang lain. Dalam program ini aspek sosial meliputi masyarakat dan pemerintah (pemerintah daerah dan kelurahan). Sistem sosial berperan penting dalam melanjutkan pengembangan dan pemeliharaan *website* profil kelurahan di Kelurahan Cipayung. Dalam kaitannya dengan program ini, permasalahan kewenangan dalam penyediaan data-data resmi masih menjadi polemik Contohnya: penyediaan data-data kependudukan yang lengkap adalah kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketidak akuratan data-data kependudukan merupakan problema tersendiri

dalam penyediaan informasi pemerintahan. Padahal, data kependudukan merupakan data base yang bermanfaat dalam penyusunan *grand*, organisasi perangkat daerah, perencanaan pembangunan, dana-dana pemerintah (BOS, jaminan sosial, dan lain sebagainya), data pemilih tetap, dan lain sebagainya.

Kelebihan dan Kelemahan Program

Program ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan informasi pemerintahan kepada publik. Pada era Revolusi 4.0, pemerintah dituntut untuk mengadopsi teknologi informasi untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, penyediaan informasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan, serta informasi lainnya kepada masyarakat luas. Penyediaan informasi pemerintahan kepada publik merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi apa yang dikerjakan oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya membangun akuntabilitas publik. Hal ini sesuai dengan definisi akuntabilitas sebagai kewajiban dari penyelenggara pemerintahan yang berkaitan dengan *answerability* terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan unjuk kerja pemerintah kepada masyarakat, etika dan moral, serta kewajiban dalam menjelaskan kepada masyarakat dalam menjalankan kewenangan secara utuh dan adil, bagaimana penyelenggara pemerintahan dapat merealisasikan program-programnya ataupun gagal dalam merealisasikannya terutama untuk hal-hal yang mempunyai dampak bagi masyarakat (Aisyah, 2018).

Dalam praktiknya, penyediaan informasi kepada masyarakat belum terinternalisasi pada birokrasi, termasuk birokrasi lokal. Pandangan tentang birokrasi sebagai pelayan masyarakat belum sepenuhnya dihayati oleh birokrat. Pentingnya mengadopsi TIK dikemukakan oleh Setiono (2018) yang menyatakan Pada masa yang serba digital seperti sekarang, keterlibatan pegawai *front-liner* (*street level bureaucrats*) untuk melayani publik telah amat sangat jauh berkurang relevansinya. Dengan berbagai teknologi yang ada, pelayanan publik tidak harus dilakukan oleh tenaga manusia, melainkan cukup dengan mesin digital yang online. Para birokrat cukup ada dibelakang mesin dan tidak perlu bertatap muka langsung dengan para pengguna jasa. Di banyak negara telah dikembangkan manajemen pelayanan publik secara modern menggunakan *e-government*, atau bahkan juga telah menyentuh pen-digital-an proses-proses demokrasi menggunakan media "*cyber democracy*".

Setiono (2018) menjelaskan lebih lanjut bahwa kondisi kita masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Singapura, terutama, telah mengaplikasikan *e-government* secara komprehensif dan progresif di semua sector pelayanan publik. Mereka membuat masterplan aplikasi *e-government* dan membuat program-program yang inovatif untuk memastikan efisiensi dan efektifitas pelayanan, serta kepuasan pengguna jasa layanan. Program tersebut ditujukan untuk tiga audience, yakni: masyarakat, bisnis, dan pemerintah (<http://www.egov.gov.sg/>). Program untuk masyarakat bertujuan untuk menyediakan saluran interaktif sehingga membuat pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Program untuk bisnis bertujuan untuk membuat pelayanan inovatif sehingga membuat kegiatan bisnis di

Singapura lebih kompetitif. Sedangkan program untuk instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan proses pelayanan publik yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan website profil kelurahan bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kelurahan dengan masyarakatnya selain untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Kelebihan program ini adalah adanya adopsi penggunaan TIK dalam pelayanan dan informasi pemerintahan kelurahan dengan jangkauan yang lebih luas dan dimungkinkan terjadinya interaksi *Government to Citizen* (*G to C*) secara lebih intensif. Kelemahan program ini belum sepenuhnya diterima oleh birokrat lokal dan pandangan tentang keterbatasan kewenangan pemerintahan kelurahan. Oleh karena itu, keberlanjutan pengembangan dan pemeliharaan website belum dapat dijamin di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Difusi profil pemerintahan kelurahan melalui pengembangan website merupakan salah satu upaya membangun keterbukaan informasi pemerintahan sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Melalui difusi informasi pemerintahan kepada masyarakat luas, pemerintah memiliki *answerability* terhadap apa yang dikerjakannya kepada masyarakat luas. Program pengembangan website dapat dikembangkan di lokasi yang lain dalam rangka membangun iklim keterbukaan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi pada sektor pemerintah.



REFERENSI

- Aisyah, Siti. 2018. Analisis Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Daerah Di Kota Tangerang Selatan. Disertasi.
- Setiono, Budi. 2018. Manajemen Pelayanan Umum Edisi 3. Jakarta: Universitas Terbuka
- Rogers. M. Everett. 1971. *Diffusion of Innovations: Third Edition*. New York: The Free Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah